

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan perempuan merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan keadilan sosial, tetapi juga dengan efektivitas pembangunan masyarakat. Di tingkat Desa, salah satu organisasi yang menjadi ruang aktualisasi perempuan adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi perempuan yang menjalankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari kesehatan, pendidikan keluarga, hingga ekonomi rumah tangga. PKK memiliki kontribusi yang minim sering kali dilihat hanya dalam aspek sosial-kultural, bukan sebagai aktor politik yang mempengaruhi arah kebijakan lokal. Hal ini menjadi menarik untuk ditelusuri lebih jauh, mengingat peran perempuan dalam ruang sosial dan politik lokal kerap terpinggirkan oleh dominasi struktur patriarki serta praktik birokrasi yang masih bersifat *top-down*.

Kelurahan dan desa di Indonesia, terutama yang memiliki struktur sosial yang kuat, PKK memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial serta mendukung keberlangsungan program-program desa. PKK dapat ikut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), keterlibatan kader PKK sering kali hadir, meskipun tidak selalu dalam posisi strategis. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), partisipasi perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan tingkat desa/kelurahan di Indonesia masih di bawah 30%, yang menandakan bahwa kehadiran perempuan

belum cukup kuat secara politik. Sementara itu, studi oleh Kusumaningsih & Rianawati (2024: 267) menunjukkan bahwa PKK memiliki kapasitas untuk mengembangkan kemampuan individu dan kolektif perempuan melalui kegiatan-kegiatan berbasis komunitas, namun sayangnya peran tersebut belum diarahkan secara politis untuk mempengaruhi kebijakan lokal.

Padahal, secara teoritis, aktivitas politik tidak selalu identik dengan kontestasi kekuasaan formal seperti pencalonan dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan kolektif. Peran kader PKK dalam menyuarakan aspirasi perempuan dan menyusun program kerja juga bisa dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik substantif. Banyak temuan lapangan yang mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam PKK cenderung bersifat simbolik sekadar pelengkap pelaksanaan program pemerintah tanpa memiliki posisi tawar terhadap arah kebijakan. Hal ini diperkuat oleh Maharani (2023:112) yang menyebutkan bahwa mayoritas kader PKK belum memiliki kesadaran kritis terhadap potensi politis dari peran mereka.

Fenomena ini sering terjadi di Desa Cijati, kader-kader PKK hanya datang untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah yang bertujuan merancang suatu kebijakan. Hasil observasi awal dari peneliti menunjukkan bahwa laki-laki yang hadir di dalam musyawarah yang diadakan oleh Desa Cijati lebih mendominasi jalannya musyawarah, baik menyampaikan pendapat atau memberikan saran serta sanggahan. Hal ini memberikan gambaran bahwa meski secara simbolik PKK di

Desa Cijati berpartisipasi dalam menentukan suatu kebijakan dari desa, akan tetapi secara substantif masih minim.

PKK memiliki potensi besar untuk memainkan peran substantif, terutama karena jaringannya yang luas dan kedekatannya dengan masyarakat akar rumput. Jika diberdayakan secara tepat, PKK dapat menjadi kekuatan politik lokal yang merepresentasikan kepentingan perempuan, bukan sekadar pelaksana teknis program pemerintah.

Melihat kenyataan tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana peran politik PKK sesungguhnya dijalankan dalam praktik pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin memahami secara kontekstual dan mendalam bagaimana pengalaman, persepsi, dan strategi para kader PKK dalam menjalankan perannya. Dengan menggali makna dan dinamika yang terjadi di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah peran PKK dalam pemberdayaan perempuan selama ini lebih bersifat simbolik atau telah menuju pada bentuk yang substantif. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah mengenai partisipasi politik perempuan dalam konteks organisasi sosial non-formal dan memberi masukan kebijakan bagi pemerintah lokal dalam memperkuat posisi perempuan sebagai aktor politik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mencoba menggali peran PKK dalam pemberdayaan perempuan di tingkat desa, namun fokus dan pendekatannya masih terbatas pada aspek sosial-ekonomi, advokasi sosial, maupun kepemimpinan individu. Maharani (2023) Penelitian Maharani mengkaji peran PKK sebagai

mediator advokasi dalam program ketahanan sosial untuk perempuan dan anak-anak. Fokus utamanya adalah bagaimana PKK menghubungkan kebutuhan kelompok rentan dengan kebijakan desa yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Maharani menempatkan PKK sebagai aktor sosial-politik yang lebih berperan sebagai fasilitator advokasi sosial daripada aktor politik dalam arti luas. Sementara itu, penelitian ini mengembangkan pemahaman tentang peran politik PKK secara lebih luas dan mendalam, tidak hanya terbatas pada advokasi sosial, tetapi juga bagaimana PKK secara kolektif berperan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian menyoroti dimensi politik substantif PKK yang selama ini kurang mendapat perhatian, terutama dalam konteks pengaruh terhadap kebijakan lokal dan pemberdayaan perempuan secara lebih komprehensif.

Arisandi (2015) Penelitian Arisandi lebih menitikberatkan pada peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dari sisi sosial-ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan program peningkatan ekonomi rumah tangga. Kajian ini mengedepankan aspek kesejahteraan materiil perempuan melalui pengembangan kapasitas ekonomi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus utama yang diangkat adalah pada dimensi politik PKK, yaitu peran PKK dalam mempengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa, bukan hanya pemberdayaan sosial-ekonomi. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan bahwa pemberdayaan perempuan melalui PKK juga harus diartikan sebagai penguatan posisi politik perempuan dalam tata kelola desa, yang selama ini belum banyak dibahas secara mendalam oleh penelitian terdahulu.

Yunitasari (2019) Penelitian Yunitasari menyoroti peran PKK dalam pemberdayaan keluarga dan penguatan kapasitas perempuan di tingkat desa, dengan fokus pada program-program kesejahteraan keluarga. Fokus ini pada pemberdayaan sosial-ekonomi dan kapasitas individu perempuan di dalam keluarga menjadi pembeda signifikan dengan penelitian ini yang melihat PKK sebagai organisasi yang tidak hanya mengelola program sosial, tetapi juga sebagai aktor politik yang mampu berperan strategis dalam perumusan kebijakan desa. Dengan demikian, penelitian memperluas perspektif pemberdayaan perempuan dengan menegaskan pentingnya posisi politik PKK sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi perempuan dalam arena pengambilan keputusan publik.

Agustin (2016) Penelitian Agustin menyoroti peran kepemimpinan Ketua PKK dalam mengelola dan memotivasi anggota serta menjalankan program pemberdayaan perempuan. Fokus penelitian ini adalah pada peran individu pemimpin dalam organisasi PKK. Perbedaannya dengan penelitian adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran kolektif organisasi PKK sebagai aktor politik di tingkat desa, bukan hanya pada aspek kepemimpinan individu. Penelitian ini juga memperluas ruang lingkup kajian dari sekadar pelaksanaan program pemberdayaan menjadi bagaimana PKK secara organisasi dapat berkontribusi dalam proses politik dan pengambilan kebijakan desa.

Hardiningsih (2020) Penelitian Hardiningsih berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui kelompok dasawisma PKK dengan pendekatan analisis gender di tingkat mikro (RW). Fokusnya pada dinamika gender dan pemberdayaan

perempuan di ranah komunitas yang sangat lokal. Sedangkan penelitian mengangkat PKK sebagai organisasi tingkat desa yang berperan dalam ranah politik dan kebijakan publik, sehingga cakupan penelitian lebih makro dan sistematis. Penelitian juga membahas bagaimana PKK dapat menjadi aktor yang substansial dalam politik lokal, sedangkan penelitian Hadiningsih lebih pada pemberdayaan sosial-kultural di level komunitas kecil.

Oleh karena itu, kajian mengenai **Peran Politik PKK dalam Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Desa (Studi Kasus PKK Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)** menjadi penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana organisasi ini tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai agen perubahan politik lokal yang merepresentasikan kepentingan perempuan secara substantif. Penelitian ini berupaya mengungkap dinamika tersebut melalui pendekatan kualitatif yang menelusuri praktik, pengalaman, dan tantangan kader PKK dalam mendorong pemberdayaan perempuan di ranah lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan jenis peran politik yang dijalankan oleh PKK dalam pemberdayaan perempuan di tingkat desa?
2. Sejauh mana partisipasi kader PKK dalam kegiatan yang bersifat politis, baik secara simbolik maupun substantif?

3. Apa saja hambatan yang dihadapi PKK dalam mendorong pemberdayaan perempuan sebagai aktor politik lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk dan jenis peran politik PKK dalam pemberdayaan perempuan di tingkat desa
2. Menganalisis tingkat partisipasi kader PKK dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan politik lokal.
3. Mengidentifikasi hambatan serta peluang yang dihadapi PKK dalam memainkan peran politik substantif sebagai organisasi perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu politik, khususnya dalam kajian partisipasi politik perempuan di tingkat lokal serta memperluas pemahaman mengenai peran organisasi non-formal seperti PKK sebagai aktor politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam penguatan peran PKK sebagai mitra strategis pembangunan lokal.

- b. Menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan.
- c. Mendorong integrasi partisipasi substantif perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan tingkat desa.

2. Bagi Pengurus PKK

- a. Membantu pengurus PKK dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga politis.
- b. Memberikan pemahaman mengenai hambatan dan potensi politis yang dimiliki oleh organisasi PKK.
- c. Menjadi referensi dalam merancang inovasi program kerja agar lebih berdampak terhadap peningkatan posisi tawar perempuan di ranah publik.

3. Bagi Perempuan di Masyarakat Desa

- a. Meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam kegiatan pembangunan dan politik lokal.
- b. Mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi masyarakat yang bersifat strategis.
- c. Memperkuat solidaritas kolektif perempuan untuk memperjuangkan aspirasi melalui jalur-jalur yang tersedia di tingkat desa.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi

- a. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti peran organisasi sosial dalam dinamika politik lokal.
- b. Memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan teori partisipasi politik berbasis gender dan komunitas.

- c. Mendorong lahirnya kajian interdisipliner antara studi politik, gender, dan pembangunan masyarakat.